

# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KANTOR CAMAT PANCUNG SOAL



## LKPj 2025

KECAMATAN PANCUNG SOAL  
KABUPATEN PESIR SELATAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 Kantor Camat Kecamatan Kecamatan Pancung Soal ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang dibuat oleh Kantor Camat Kecamatan Pancung Soal sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh oleh Kantor Camat Kecamatan Pancung Soal selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2025. Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan Pancung Soal. Sementara itu, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2025 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2025. Penyampaian laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Kecamatan Pancung Soal kepada para stakeholders selama tahun 2025. Informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Kecamatan Pancung Soal dalam upaya pemenuhan visi dan misinya.

Kami berharap agar Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Inderapura, 23 Februari 2026  
**Camat Pancung Soal,**  
  
**MUKHTAR IS, SE.**  
**NIP. 19680611 199303 1 006**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah laporan kinerja tahun kesatu dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan 2 Sasaran strategis dan 3 Indikator Kinerja utama.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Kecamatan Pancung Soal dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2024, sebagai berikut:

**MISI 1 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih Dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.**

Pencapaian Kinerja untuk 3 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang terdapat pada Misi I sebesar 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon III)**  
**Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan**

| No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Rumus Perhitungan           | Satuan | Target    | Realisasi | Interpretasi Capaian IKU                                                      |
|----|------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                        | 3                           | 4      | 5         | 6         | 7                                                                             |
| 1. | Nilai AKIP Perangkat Daerah              | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Angka  | BB (77,0) |           | Diperlukan penguatan pada kualitas perencanaan kinerja, konsistensi indikator |

|    |                                    |                                    |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------|------------------------------------|-------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | Angka | 86 | 91.40 | pendukung, tindak lanjut LHE LKPj dan evaluasi internal<br>Capaian indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,40 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori sangat baik nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap aspek pelayanan, produk layanan dan kompetensi petugas layanan. |
| 3. | Nilai kematangan Inovasi Kecamatan | Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | Angka | 75 | 30.0  | Tingkat kematangan inovasi masih rendah dari target yang ditetapkan karena implementasi dan pengembangan inovasi belum optimal, baik dari aspek perencanaan, keberlanjutan maupun dampak inovasi maka diperlukan dorongan penguatan budaya inovasi, pendampingan teknis, serta dukungan sumber daya manusia dan pendanaannya.    |

|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                 |        |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi Dan Kinerja Baik | Jumlah Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik<br><br>$\frac{\text{Jumlah Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik}}{\text{Jumlah Nagari yang di Evaluasi}} \times 100 \%$ | Persen | 82%   | 80% | Sebagian besar pemerintahan telah menunjukkan tata kelola administrasi dan kinerja yang baik namun masih diperlukan pembinaan, monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas administrasi nagari agar target dapat tercapai sepenuhnya. Capaian indikator menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrim berada pada nilai Nol persen yang berarti target telah tercapai, tidak terdapat penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrim, kedepan perlu upaya untuk mempertahankan capaian melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemutakhiran data secara berkala. Nilai ini mencerminkan kondisi status gizi balita di |
| 5. | Angka Kemiskinan Ekstrim                                                   | -                                                                                                                                                                                               | Persen | 0%    | 0%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Prevalensi Stunting (Eppgbm)                                               | Jumlah Penderita Stunting                                                                                                                                                                       | Persen | 6,65% | 2%  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                      |                                                                  |        |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                      | $\frac{\text{Jumlah balita}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$ |        |     |       | Kecamatan Pancung Soal, capaian ini masih perlu ditekan melalui intervensi gizi spesifik dan intensive, peningkatan pelayanan kesehatan, edukasi gizi keluarga serta penguatan konvergensi stunting.                                                              |
| 7. | Persentase konflik yang diselesaikan | Jumlah Konflik yang diselesaikan<br>$\times 100\%$               | Persen | 82% | 100 % | Menunjukkan bahwa seluruh konflik yang dilaporkan telah berhasil diselesaikan, hal ini                                                                                                                                                                            |
|    |                                      | Jumlah Konflik yang dilaporkan                                   |        |     |       | mencerminkan efektivitas koordinasi, mediasi dan peran aktif pemerintah kecamatan bersama pemangku kepentingan terkait. Kedepannya perlu dipertahankan melalui deteksi dini kerawanan konflik, penguatan komunikasi sosial dan peningkatan kapasitas kelembagaan. |

## DAFTAR ISI

Halaman

### KATA PENGANTAR

### IKHTISAR EKSEKUTIF

i

### DAFTAR TABEL

### DAFTAR GAMBAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

|      |                                         |   |
|------|-----------------------------------------|---|
| 1.1. | Latar Belakang .....                    | 1 |
| 1.2. | Maksud dan Tujuan.....                  | 1 |
| 1.3. | Struktur Organisasi dan Tata Kerja..... | 2 |
| 1.4. | Landasan Hukum.....                     | 6 |
| 1.5. | Sistematika Penyusunan.....             | 9 |

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

|      |                                         |    |
|------|-----------------------------------------|----|
| 2.1. | Rencana Strategis Perangkat Daerah..... | 10 |
| 2.2. | Rencana Kinerja.....                    | 13 |
| 2.3. | Perjanjian Kinerja.....                 | 19 |

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 22

|      |                                             |    |
|------|---------------------------------------------|----|
| 3.1. | Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja | 22 |
| 3.2. | Hasil Pengukuran Kinerja                    | 23 |
| 3.3. | Capaian Kinerja Perangkat Daerah            | 24 |
| 3.4. | Realisasi Anggaran                          | 36 |

#### BAB IV PENUTUP 51

|      |            |    |
|------|------------|----|
| 4.1. | Kesimpulan | 51 |
| 4.2. | Saran      | 52 |

## DAFTAR TABEL

| No  | Daftar tabel | Uraian                                                                                                                                              | Halaman |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | Tabel 1.1    | Jumlah Pegawai di Kecamatan Pancung Soal Berdasarkan Golongan Tahun 2025 Golongan Tahun 2025                                                        | 4       |
| 2.  | Tabel 1.2    | Jumlah Pegawai dilingkungan Kecamatan Pancung Soal Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025                                                                | 5       |
| 3.  | Tabel 1.3    | Persentase Data Pegawai Kecamatan Pancung Soal                                                                                                      | 5       |
| 4.  | Tabel 2.1    | Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan                                                                                 | 12      |
| 5.  | Tabel 2.2    | Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan                                                      | 12      |
| 6.  | Tabel 2.2.1  | Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pancung Soal tahun 2025                                                                                             | 15      |
| 7.  | Tabel 2.2.2  | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan                                                       | 16      |
| 8.  | Tabel 2.2.3  | Matrik Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat daerah Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025-2029                                                   | 17      |
| 9.  | Tabel 2.2.4  | Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan                                                 | 18      |
| 10. | Tabel 2.3.1  | Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025                                                                                                | 20      |
| 11. | Tabel 2.3.2  | Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025                                                                                     | 21      |
| 12. | Tabel 3.1.1  | Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025           | 23      |
| 13. | Tabel 3.2.1  | Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025                                                                               | 23      |
| 14. | Tabel 3.3.1  | Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon III) Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.                              | 25      |
| 15. | Tabel 3.3.2  | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2024                                                                          | 28      |
| 16. | Tabel 3.3.3  | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun Sebelumnya                                                                      | 28      |
| 17. | Tabel 3.3.4  | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026 | 29      |
| 18. | Tabel 3.3.5  | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya                    | 30      |
| 19. | Tabel 3.3.6  | Rincian laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 dan 2024                                                                                             | 31      |
| 20. | Tabel 3.3.7  | Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Nilai AKIP                                                                                      | 35      |
| 21. | Tabel 3.3.8  | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025                                                                                               | 36      |
| 22. | Tabel 3.3.9  | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 Dengan Tahun                                             | 37      |

|     |              |                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     |              | Sebelumnya                                                                                                                                                                                                          |    |
| 23. | Tabel 3.3.10 | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026                                                    | 38 |
| 24. | Tabel 3.3.11 | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya                                                                       | 38 |
| 25. | Tabel 3.3.12 | Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                      | 39 |
| 26. | Tabel 3.3.13 | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025                                                                                                                        | 41 |
| 27. | Tabel 3.3.14 | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya                                                                                                | 43 |
| 28. | Tabel 3.3.15 | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026                                             | 43 |
| 29. | Tabel 3.3.16 | Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025                                                                                                                         | 45 |
| 30. | Tabel 3.3.17 | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Tahun 2025                                                                            | 46 |
| 31. | Tabel 3.3.18 | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026 | 48 |
| 32. | Tabel 3.3.19 | Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Pada Tahun 2025                                                                        | 49 |
| 33. | Tabel 3.3.20 | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025                                                                                                                            | 51 |
| 34. | Tabel 3.3.21 | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Angka Kemiskinan Ekstrem Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026                                                 | 51 |
| 35. | Tabel 3.3.22 | Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Angka Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025                                                                                                                             | 53 |

|     |              |                                                                                                                                           |    |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 36. | Tabel 3.3.23 | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025                                                                                     | 54 |
| 37. | Tabel 3.3.24 | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026. | 55 |
| 38. | Tabel 3.3.25 | Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Prevalensi Stunting (EPPGM)                                                           | 56 |
| 39  | Tabel 3.3.26 | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025                                                                                     | 58 |
| 40. | Tabel 3.3.27 | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026  | 58 |
| 41. | Tabel 3.3.28 | Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya                     | 59 |
| 42. | Tabel 3.3.29 | Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran                                                                                                 | 60 |
| 43  | Tabel 3.4.1  | Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kantor Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025                         | 62 |

## DAFTAR GAMBAR

| No | Daftar Gambar | Uraian                                       | Halaman |
|----|---------------|----------------------------------------------|---------|
| 1. | Gambar 1      | Struktur Organisasi Kantor Camat Pancng Soal | 4       |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran Tahun 2025 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan LKPj kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPj memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, pada tahun 2025 Bupati Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPj Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kabupaten Sumatera Barat. LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. LKPj Bupati Pesisir Selatan Anggaran Tahun 2025 tersebut, selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Sumatera Barat, yang dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumatera Barat.

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasara yang

diamanatkan kepada Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mencakup hal- hal sebagai berikut:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2025 sebagai sarana pertanggung jawaban Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2025.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

### **1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Kecamatan Pancung Soal terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat

kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

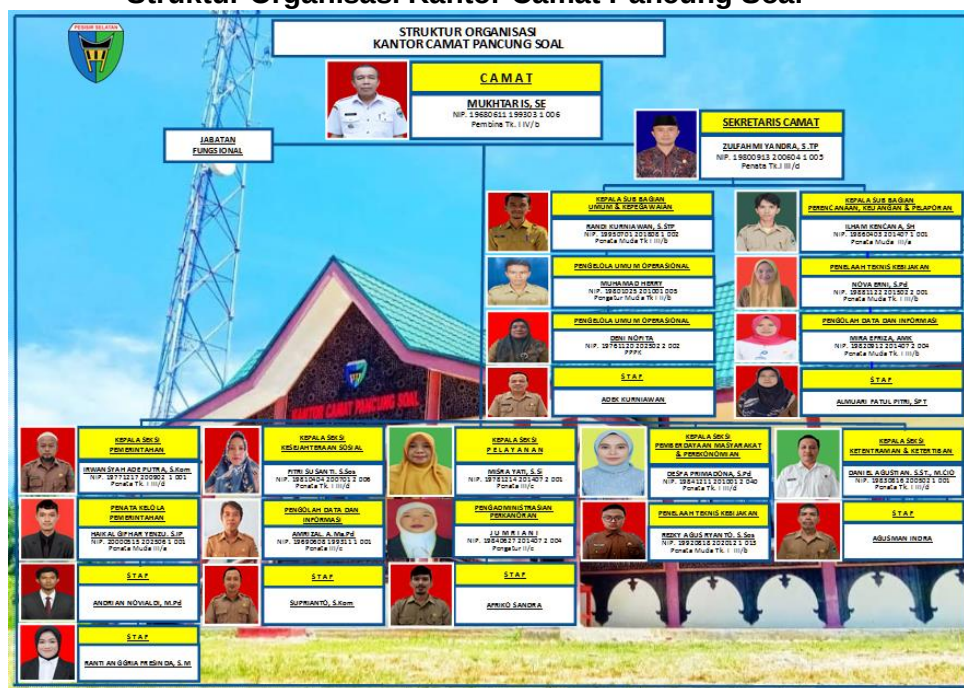
Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
  - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Jabatan Fungsional.

**Gambar 1.**  
**Struktur Organisasi Kantor Camat Pancung Soal**



**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai di Kecamatan Pancung Soal**  
**Berdasarkan Golongan**  
**Tahun 2025**

| No  | JABATAN                                        | JUMLAH   |         |   |    |     |    |       |
|-----|------------------------------------------------|----------|---------|---|----|-----|----|-------|
|     |                                                | Sukarela | Non PNS | I | II | III | IV | Total |
| 1.  | Camat                                          | -        | -       | - | -  | -   | 1  | 1     |
| 2.  | Sekretaris                                     | -        | -       | - | -  | 1   | -  | 1     |
| 3.  | Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian                   | -        | -       | - | -  | 1   | -  | 1     |
| 4.  | Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan    | -        | -       | - | -  | 1   | -  | 1     |
| 5.  | Seksi Pemerintahan                             | -        | -       | - | -  | 1   | -  | 1     |
| 6.  | Seksi Ketentraman dan Ketertiban               | -        | -       | - | -  | 1   | -  | 1     |
| 7.  | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | -        | -       | - | -  | 1   | -  | 1     |
| 8.  | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial              | -        | -       | - | -  | 1   | -  | 1     |
| 9.  | Seksi Pelayanan                                | -        | -       | - | -  | 1   | -  | 1     |
| 10. | Fungsional Umum                                | -        | -       | - | 3  | 3   | -  | 6     |

|               |                  |          |          |          |          |           |          |           |
|---------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 11.           | Honorer/Sukarela | 2        | 5        | -        | -        | -         | -        | 7         |
| <b>JUMLAH</b> |                  | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>0</b> | <b>3</b> | <b>11</b> | <b>1</b> | <b>22</b> |

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Pancung Soal 2025

**Tabel 1.2.**  
**Jumlah Pegawai di Lingkungan Kecamatan Pancung Soal**  
**Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025**

| No            | Pegawai/Jabatan                                | SMA      | D3       | S1        | S2       | Jumlah    |
|---------------|------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 1.            | Camat                                          | -        | -        | 1         | -        | 1         |
| 2.            | Sekretaris                                     | -        | -        | 1         | -        | 1         |
| 3.            | Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan                    | -        | -        | 1         | -        | 1         |
| 4.            | Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan    | -        | -        | 1         | -        | 1         |
| 5.            | Seksi Pemerintahan                             | -        | -        | 1         |          | 1         |
| 6.            | Seksi Ketentraman dan Ketertiban               | -        | -        | -         | 1        | 1         |
| 7.            | Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian | -        | -        | 1         | -        | 1         |
| 8.            | Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial              | -        | -        | 1         | -        | 1         |
| 9.            | Seksi Pelayanan                                | -        | -        | 1         | -        | 1         |
| 10.           | Fungsional Umum                                | 3        | -        | 3         | -        | 6         |
| 11.           | Honorer                                        | 3        | -        | 3         | 1        | 7         |
| <b>JUMLAH</b> |                                                | <b>6</b> | <b>-</b> | <b>14</b> | <b>2</b> | <b>22</b> |

Sumber: Sub bagian Kepegawaian Kecamatan Pancung Soal 2025

**Tabel 1.3**  
**Persentase Data Pegawai Kecamatan Pancung Soal**

| No            | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH    |          | PROSENTASE  |             |
|---------------|--------------------|-----------|----------|-------------|-------------|
|               |                    | PNS       | NON PNS  | PNS         | NON PNS     |
| 1             | S2                 | 1         | 1        | 6,66%       | 14,28%      |
| 2             | S1                 | 11        | 3        | 73,33%      | 3,85%       |
| 3             | D3                 | 0         | 0        | 0%          | 0%          |
| 4             | SLTA               | 3         | 2        | 20,00%      | 2,85%       |
| 5             | SLTP               | 0         | 0        | 0%          | 0%          |
| 6             | SD                 | 0         | 0        | 0%          | 0%          |
| <b>JUMLAH</b> |                    | <b>15</b> | <b>7</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Sumber: Sub bagian Kepegawaian Kecamatan Pancung Soal 2025

Dari tabel 1.3 dapat digambarkan bahwa dari tingkat pendidikan, untuk PNS didominasi dengan tingkat pendidikan Strata 1 (S.1) dan tingkat pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas SLTA) yang memiliki prosentase yakni 73,33% dan 20,00%. Demikian juga dengan Non PNS, dengan tingkat pendidikan Stara I (S.1) sebanding dengan SLTA yakni sebanyak 3,85% dan 2,85%.

#### **1.4 Dasar Hukum**

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPj Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Pesisir Selatan.
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## **1.5 Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja (LKjIP) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud Tujuan, Struktur Organisasi dan tata Kerja, Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama, Landasan hukum, dan Sistematika Penyusunan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja serta Indikator Kinerja Utama.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Pemerintah dan Realisasi Anggaran.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

### **DAFTAR LAMPIRAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA**

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan.

Rencana Pembangunan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Renstra Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra

Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan tujuan jangka menengah Kecamatan Pancung Soal kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah Merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang akan dicapai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan  
Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/ instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator.

Rumusan Tujuan dan Sasaran beserta target sampai dengan tahun 2030 disajikan dalam table berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pancung Soal**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

| <b>Tujuan</b>                                                                      | <b>Sasaran</b>                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi | Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja       |
|                                                                                    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                 |
|                                                                                    | Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah                                   |
|                                                                                    | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari |
|                                                                                    | Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan                      |

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/ instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah**  
**Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan**

| <b>Sasaran</b>                                                         | <b>Indikator Kinerja</b>                                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja       | Nilai AKIP Kecamatan                                             |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                 |
| Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah                                   | Nilai Kematangan Inovasi                                         |
| Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari | Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintah Yang Baik |
| Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja       | Angka Kemiskinan Ekstrim.                                        |
|                                                                        | Prevalensi Stunting (EPPGBM)                                     |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                 | Persentase Konflik Yang                                          |

### 2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2021- 2026 adalah :

**“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”**

### 2.1.2 Misi

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermatahat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2025 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Pesisir Selatan menjadi Sentra pangan dan destinasi wisata unggul untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil dan inklusif
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestasi, Adaptif, dan Tangguh Bencana

## 2.2 Rencana Kerja

Kinerja pelayanan Kecamatan Pancung Soal dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Pancung Soal, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi:

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana trantib.
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya data umum yang akurat.
7. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
8. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi perdagangan.
9. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
10. Tersedia bantuan dan akses permodalan.
11. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluruh pihak yang mendapatkan manfaat atau pelayanan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Pancung Soal baik itu internal Kecamatan (pegawai, perangkat desa/kelurahan) maupun eksternal (masyarakat umum, organisasi masyarakat dan lain-lain). Lebih detail, kelompok sasaran layanan Kecamatan Pancung Soal meliputi :

- **Internal Kecamatan** : Pegawai kecamatan, perangkat desa/kelurahan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam operasional kecamatan.
- **Masyarakat Umum** : Penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan, yang menjadi penerima manfaat langsung dari program dan pelayanan kecamatan.
- **Organisasi Masyarakat** : Lembaga non-profit, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok lain yang berperan aktif dalam pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan.
- **Lain-lain** : Pemangku kepentingan lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kecamatan, seperti pelaku usaha, lembaga pendidikan dan

lembaga kesehatan.

Dengan kata lain, kelompok sasaran layanan kecamatan mencakup semua pihak yang berkepentingan dan mendapatkan manfaat dari berbagai program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

**Tabel 2.2.1**  
**Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pancung Soal tahun 2025**

| No | Sasaran                                                                | Indikator                                         | Target        | Realisasi | Capaian |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|
| 1  | Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja       | Nilai AKIP Pemerintahan Daerah                    | BB<br>(77.00) |           |         |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                  | 86            |           |         |
| 3  | Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah                                   | Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan                | 75            |           |         |
| 4  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari | Persentase Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik | 82%           |           |         |
|    |                                                                        | Angka Kemiskinan Ekstrim                          | 0%            |           |         |
|    |                                                                        | Prevalensi Stunting (EPPGBM)                      | 6,65%         |           |         |
| 5  | Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan                      | Persentase Konflik Yang Diselesaikan              | 82%           |           |         |

**Tabel 2.2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan**

| No  | Tujuan                                                                             | Sasaran                                                                        | Indikator sasaran                                                 | Target Kinerja Tujuan/Sasaran<br>Pada Tahun Ke- |              |              |              |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
|     |                                                                                    |                                                                                |                                                                   | 2025                                            | 2026         | 2027         | 2028         | 2029      |
| (1) | (2)                                                                                | (3)                                                                            | (4)                                                               | (5)                                             | (6)          | (7)          | (8)          | (9)       |
| 1.  | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi | Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja               | Nilai AKIP Kecamatan                                              | BB<br>(77,00)                                   | A<br>(80,00) | A<br>(85,00) | A<br>(85,00) | A (85,00) |
|     |                                                                                    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik<br>Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                                  | 86                                              | 90           | 89           | 90           | 90        |
|     |                                                                                    |                                                                                | Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan                                | 75                                              | 75           | 91           | 92           | 93        |
|     |                                                                                    | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari.        | Persentase nagari yang memiliki tata kelola pemerintah yang baik. | 82%                                             | 85           | 84           | 85           | 90        |
|     |                                                                                    | Terwujudnya Pemerintahan Kecamatan Yang Akuntabel dan Berkinerja.              | Angka Kemiskinan Ekstrim                                          | 0%                                              | 0%           | 0%           | 0%           | 0%        |
|     |                                                                                    |                                                                                | Prevalensi Stunting (EPPGBM)                                      | 6,65%                                           | 5,5%         | 5%           | 4%           | 3%        |
|     |                                                                                    | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                         | Persentase Konflik Yang Diselesaikan                              | 82%                                             | 90%          | 85%          | 90%          | 95%       |

**Tabel 2.2.3**  
**Matrik Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**  
**Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025-2029**

| No  | Tujuan                                                                             | Indikator Tujuan                                   | Sasaran                                                                                                         | Indikator sasaran                                                 | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- |           |           |           |           | Kondisi Akhir |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|     |                                                                                    |                                                    |                                                                                                                 |                                                                   | 2025                                         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |               |
| (1) | (2)                                                                                |                                                    | (3)                                                                                                             | (4)                                                               | (6)                                          | (7)       | (8)       | (9)       | (10)      | (11)          |
| 1.  | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi | Persentase capaian kinerja kerja Nilai PDRB (ADHK) | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan                                                         | Nilai akip kecamatan                                              | BB (77,00)                                   | A (80,00) | A (85,00) | A (85,00) | A (85,00) | A (85,00)     |
|     |                                                                                    |                                                    | Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan                                                       | Indeks kepuasan masyarakat (ikm)                                  | 86                                           | 90        | 89        | 90        | 90        | 90            |
|     |                                                                                    |                                                    |                                                                                                                 | Nilai kematangan inovasi kecamatan                                | 75                                           | 75        | 91        | 92        | 93        | 93            |
|     |                                                                                    |                                                    | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kualitas pembinaan serta pengawasan pemerintahan nagari.               | Persentase nagari yang memiliki tata kelola pemerintah yang baik. | 82%                                          | 85        | 84        | 85        | 90        | 90            |
|     |                                                                                    |                                                    |                                                                                                                 | Angka kemiskinan ekstrim                                          | 0%                                           | 0%        | 0%        | 0%        | 0%        | 0%            |
|     |                                                                                    |                                                    |                                                                                                                 | Prevalensi stunting (epggbm)                                      | 6,65%                                        | 5,5 %     | 5%        | 4%        | 3%        | 3%            |
|     |                                                                                    |                                                    | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat kecamatan meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat | Persentase konflik yang diselesaikan                              | 82%                                          | 90 %      | 85%       | 90%       | 95%       | 95%           |

**Tabel 2.2.4.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Pancung Soal**  
**Kabupaten Pesisir Selatan**

**Tahun 2025**

| <b>Program/Kegiatan</b>                                                                                             | <b>Pagu Indikatif</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                                              | <b>1.802.776.789</b>  |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 4.569.460             |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 1.841.650             |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | 2.473.610             |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 1.492.592.129         |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                       | 52.770.000            |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 4.483.800             |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                 | 1.175.050             |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 2.128.610             |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 2.098.297             |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 2.275.750             |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 19.154.160            |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 5.272.000             |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           | 9.900.000             |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 61.366.500            |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 14.087.500            |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 300.000               |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 12.000.000            |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 66.719.004            |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 36.799.269            |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 4.050.000             |

|                                                                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                  | 6.720.000            |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                              | <b>2.434.000</b>     |
| Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                               | 450.000              |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                          | 1.984.000            |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                                     | <b>19.002.850</b>    |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                     | 999.850              |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 | 18.003.000           |
| <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                     | <b>2.148.740</b>     |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 2.148.740            |
| <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>                                                                       | <b>23.121.500</b>    |
| Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                       | 21.277.500           |
| Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                      | 1.844.000            |
| <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                                     | <b>5.240.000</b>     |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                | 5.240.000            |
| <b>JUMLAH</b>                                                                                                                 | <b>1.854.723.879</b> |

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan dapat terlihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3.1**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025**

| No. | Sasaran Strategis                                                      | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Target   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|
| 1.  | Terwujudnya pemerintahan Kecamatan yang Akuntabel dan Berkinerja.      | Nilai Evaluasi LAKIP                              | Skala  | BB(77,0) |
| 2.  | Meningkatkan kualitas pelayanan publik                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                  | Persen | 86       |
| 3.  | Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah                                   | Nilai kematangan Inovasi Kecamatan                | Nilai  | 75       |
| 4   | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari | Persentase nagari yang memiliki administrasi baik | %      | 82%      |
|     |                                                                        | Angka Kemiskinan Ekstrim                          | %      | 0%       |
|     |                                                                        | Prevalensi Stunting (EPPGBM)                      | %      | 6,65%    |
| 5   | Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan                   | Persentase Konflik yang diselesaikan              | %      | 82%      |

### 2.3.1 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3.2.**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025**

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU)                     | Satuan | Target    | Formulasi                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nilai AKIP Perangkat Daerah                       | Skala  | BB (77,0) | Nilai Evaluasi LAKIP                                                                           |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                  | %      | 86        | $\frac{\sum \text{Pelayanan yang tepat waktu}}{\sum \text{Pelayanan yang masuk}} \times 100\%$ |
| 3. | Nilai kematangan Inovasi Kecamatan                | Nilai  | 75        | Nilai Kematangan                                                                               |
| 4  | Persentase nagari yang memiliki administrasi baik | %      | 82%       | $\frac{\text{Pembinaan yang Dilaksanakan}}{100\% \text{ Jumlah Nagari}} \times 100\%$          |
| 5  | Angka Kemiskinan Ekstrim                          | %      | 0%        | Persentase Angka kemiskinan                                                                    |
| 6  | Prevalensi Stunting (EPPGBM)                      | %      | 6,65%     | Penurunan Angka Stunting                                                                       |
| 7  | Persentase Konflik yang diselesaikan              | %      | 82%       | $\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang masuk}}{\text{Jumlah Konflik di selesaikan}} \times 100\%$  |

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2025.

#### **3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja**

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja

kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1

**Tabel 3.1.1**

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian  
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran  
Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun  
2025**

| No | Klasifikasi Penilaian | Predikat    |
|----|-----------------------|-------------|
| 1. | 85% - 100%            | Sangat Baik |
| 2. | 69% - 84%             | Baik        |
| 3. | 53% - 68%             | Cukup       |
| 4. | < 53%                 | Gagal       |

### 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 5 (Lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2.1**

**Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025**

| NO                                                                                          | Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis | Indikator Kinerja    | Satuan | 2025       |           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|------------|-----------|-------------|
|                                                                                             |                                   |                      |        | Target     | Realisasi | Capaian (%) |
| Misi 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokrasi dan Transparan |                                   |                      |        |            |           |             |
| Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi                           |                                   |                      |        |            |           |             |
| 1.1                                                                                         | Terwujudnya Pemerintahan Yang     | Nilai AKIP Kecamatan | Skala  | BB (77,00) |           |             |

|     |                                                                        |                                                                          |       |       |       |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|     | Akuntabel dan Berkinerja                                               | Pancung Soal                                                             |       |       |       |        |
| 1.2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                                 | Indek kepuasan masyarakat (IKM)                                          | %     | 86    | 91.40 | 106,28 |
| 1.3 | Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah                                   | Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan                                       | Nilai | 75    | 30,00 | 40%    |
| 1.4 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintahan Nagari | Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik | %     | 82%   | 80    | 97,56  |
|     |                                                                        | Angka Kemiskinan Ekstrem                                                 | %     | 0%    | 0%    | 100    |
|     |                                                                        | Prevalensi Stunting (EPPGM)                                              | %     | 6,41% | 2%    | >100   |
| 1.5 | Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan                   | Persentase Konflik yang diselesaikan                                     | %     | 80%   | 80    | 100    |

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 7 (Tujuh) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 5 (Lima) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2025 sebanyak 4 (empat) indikator nilainya predikat **Baik**.

### 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Pancung Soal

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja untuk ke depannya. Sehingga bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Kantor Camat Pancung Soal sebagai salah satu perangkat daerah yang berada di lingkungan Pemda Pesisir Selatan berkewajiban untuk membuat Capaian Indikator Kinerja Utama yang dapat dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025.

**Tabel 3.3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Eselon III)**  
**Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan**

| No | Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah | Rumus Perhitungan                  | Satuan | Target   | Realisasi | Interpretasi Capaian IKU                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nilai AKIP Perangkat Daerah              | Nilai AKIP Perangkat Daerah        | Angka  | BB(77,0) |           | Diperlukan penguatan pada kualitas perencanaan kinerja, konsistensi indikator pendukung, tindak lanjut LHE LKPj dan evaluasi internal                                                                                                                                 |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   | Angka  | 86       | 91.40     | Capaian indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,40 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori sangat baik nilai ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap aspek pelayanan, produk layanan dan kompetensi petugas layanan. |
| 3. | Nilai kematangan Inovasi Kecamatan       | Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | Angka  | 75       | 30.0      | Tingkat kematangan inovasi masih rendah dari target yang ditetapkan karena implementasi dan pengembangan inovasi belum optimal, baik dari aspek perencanaan, keberlanjutan maupun dampak inovasi maka diperlukan dorongan penguatan budaya                            |

|    |                                                                            |                                                                                                                               |        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi Dan Kinerja Baik | $\frac{\text{Jumlah Nagari yang Memiliki Administrasi dan Kinerja baik}}{\text{Jumlah Nagari yang di Evaluasi}} \times 100\%$ | Persen | 82%   | 80%   | inovasi, pendampingan teknis, serta dukungan sumber daya manusia dan pendanaannya. Sebagian besar pemerintahan telah menunjukkan tata kelola administrasi dan kinerja yang baik namun masih diperlukan pembinaan, monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas administrasi nagari agar target dapat tercapai sepenuhnya.      |
| 5. | Angka Kemiskinan Ekstrem                                                   | -                                                                                                                             | Persen | 0%    | 0%    | Capaian indikator menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem berada pada nilai Nol persen yang berarti target telah tercapai, tidak terdapat penduduk yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, kedepan perlu upaya untuk mempertahankan capaian melalui program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemutakhiran data secara berkala. |
|    | Prevalensi Stunting (Eppgbm)                                               | $\frac{\text{Jumlah Penderita Stunting}}{\text{Jumlah balita}} \times 100\%$                                                  | Persen | 6,65% | 2%    | Nilai ini mencerminkan kondisi status gizi balita di Kecamatan Pancung Soal, capaian ini masih perlu ditekan melalui intervensi gizi spesifik dan intensive, peningkatan pelayanan kesehatan, edukasi gizi keluarga serta penguatan konvergensi stunting.                                                                                           |
| 7. | Persentase konflik yang diselesaikan                                       | $\frac{\text{Jumlah Konflik yang diselesaikan}}{100\%} \times 100\%$                                                          | Persen | 82%   | 100 % | Menunjukkan bahwa seluruh konflik yang dilaporkan telah berhasil diselesaikan, hal ini                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Jumlah Konflik yang dilaporkan |  |  |  | mencerminkabn efektivitas koordinasi, mediasi dan peran aktif pemerintah kecamatan bersama pemangku kepentingan terkait. Kedepannya perlu dipertahankan melalui deteksi dini kerawanan konflik, penguatan komunikasi sosial dan peningkatan kapasitas kelembagaan. |
|--|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Keterangan:**

1. Kolom 1: Diisi dengan nomor secara sistematis;
2. Kolom 2: Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Kepala PD terkait sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
3. Kolom 3: Diisi dengan rumus perhitungan Indikator Kinerja Utama Kepala PD
4. Kolom 4: Diisi dengan satuan Indikator Kinerja;
5. Kolom 5: Diisi dengan Target sesuai Perubahan RKPD Tahun 2025;
6. Kolom 6: Diisi dengan capaian Indikator Kinerja; dan
7. Kolom 7: Diisi dengan penjelasan/interpretasi capaian IKU Bupati.

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

**Sasaran 1 : Terwujudnya pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan Berkinerja terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal

**1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.**

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.3.2**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Nilai AKIP Tahun 2025**

| No | Sasaran                                               | Indikator                         | Satuan | 2025       |             |             |
|----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|
|    |                                                       |                                   |        | Target     | Realisasi   | Capaian (%) |
| 1  | Terwujudnya Pemerintahan Yang kuntabel dan Berkinerja | Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal | Skala  | BB (77,00) | BB (75,60)* | 98,18       |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3.2 di atas dapat dilihat Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 masih menggunakan Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal Tahun 2024 dikarenakan Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 masih dalam tahap penilaian. Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

## **2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.**

Analisis akuntabilitas kinerja juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke Lima pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

**Tabel 3.3.3.**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai AKIP Tahun  
Sebelumnya**

| No | Indikator Kinerja                 | Satuan | 2022       |            |             | 2023       |            |             | 2024       |            |             |
|----|-----------------------------------|--------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
|    |                                   |        | Target     | Realisasi  | Capaian (%) | Target     | Realisasi  | Capaian (%) | Target     | Realisasi  | Capaian (%) |
| 1  | Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal | Skala  | BB (75,00) | BB (74,53) | 99,37       | BB (75,00) | BB (76,22) | 100,43      | BB (75,00) | BB (75,60) | 98,18       |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari tabel 3.3.3 di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 1 (Satu) sebesar 98,18 %. pencapaian sasaran strategis 1 (satu) termasuk kategori keberhasilan ***Sangat Memuaskan***.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kecamatan Pancung Soal pada tahun 2022 realisasinya 74,53 tahun 2023 realisasinya 76,22 dan tahun 2024 adalah 75,60 dengan kategori **BB**.

### **3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.4 dibawah ini :

**Tabel 3.3.4**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai**  
**AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana**  
**Strategis Kecamatan tahun 2021-2026**

| No | Indikator Kinerja                 | Satuan | Target PK | Realisasi PK | Capaian PK | Target Restra | Realisasi restru | Capaian Restra |
|----|-----------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|---------------|------------------|----------------|
|    |                                   |        | 2025      | 2025         | 2025       | 2025          | 2025             | 2025           |
| 1  | Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal | Skala  | BB        | BB           | BB         | BB            | BB               | BB             |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Realisasi Kinerja dibandingkan dengan target Jangka menengah sesuai Renstra dapat tercapai. Walaupun masih ada program kegiatan yang masih perlu perbaikan dengan kata lain bisa lebih tinggi apabila sampai pada akhir periode Tahun 2025 semua berjalan lancar.

**4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.5 dibawah ini :

**Tabel 3.3.5**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai**  
**AKIP Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar**  
**Nasional lainnya**

| Indikator Kinerja                 | Satuan | Target PK | Realisasi PK | Capaian PK | Target/ Standar Nasional | Realisasi/ Standar Nasional | Capaian/ Standar Nasional |
|-----------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                   |        | 2024      | 2024         | 2024       | 2024                     | 2024                        | 2024                      |
| Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal | Skala  | BB        | BB           | BB         | -                        | -                           | -                         |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

**5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

Sasaran kualitas penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu nilai hasil Evaluasi AKIP kecamatan Pancung Soal , Komponen Perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan misi camat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik. Rician laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 dan 2024 penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.3.6 dibawah ini :

**Tabel 3.3.6**  
**Rincian laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 dan 2024**

| No                          | Komposisi Yang Dinilai                  | Nilai      |              | Komposisi yang dinilai                  | Nilai      |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|--------------|
|                             |                                         | Bobot      | 2023         |                                         | Bobot      | 2024         |
| A                           | Perencanaan Kinerja                     | 30,00      | 25,35        | Perencanaan Kinerja                     | 30,00      | 19,91        |
| B                           | Pengukuran Kinerja                      | 30,00      | 18,05        | Pengukuran Kinerja                      | 30,00      | 22,55        |
| C                           | Pelaporan Kinerja                       | 15,00      | 13,57        | Pelaporan Kinerja                       | 15,00      | 11,27        |
| D                           | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00      | 19,295       | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00      | 21,88        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b> |                                         | <b>100</b> | <b>76,22</b> | <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>             | <b>100</b> | <b>75,60</b> |

Sumber : LHE AKIP Kecamatan Pancung Soal Tahun 2024

**A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 19,91;**

1. Dokumen Perencanaan kinerja telah lengkap dan setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.
2. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART dan menggunakan penyelarasan (cascading) sisetiap level secara logis namun terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu penetapan target kinerja “meningkatnya keterbukaan informasi publik” pada dokumen PK dan LKJ tidak selaras dengan dokumen Renstra.

3. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan namun terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya belum didukung dengan notulen/laporan hasil monitoring pencapaian kinerja/realisasi rencana aksi.

**B. Pengukuran Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 22,55;**

Hasil Evaluasi terhadap pengukuran kinerja sebesar 22,55 dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan. Hal ini didukung dengan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja oleh Kecamatan Pancung Soal.
2. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan karena Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala dan telah dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
3. Pengukuran Kinerja telah dilakukan namun masih terdapat hal yang mendapat perhatian yaitu mekanisme dalam mengumpulkan data kinerja yang dapat diandalkan belum terpenuhi karena SOP tentang pengumpulan data kinerja yang tidak update dan belum terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.

**C. Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 11,27;**

Hasil Evaluasi terhadap pelaporan kinerja sebesar 11,27 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dokumen pelaporan kinerja telah lengkap, telah direviu, telah dipublikasikan dan disampaikan tepat waktu.
2. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar yang menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja dan upaya perbaikan/ penyempurnaannya namun terdapat hal-hal yang perlu mendapat

perhatian dalam pembuatan LKj yaitu:

- 1) LKj belum menyajikan data dukung (sumber data) terkait kinerja yang dicapai sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan.
  - 2) Pada LKj dan IKU tidak ada dijabarkan formula untuk pencapaian kinerja.
  - 3) LKj tidak menyajikan analisis dan evaluasi perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan jangka menengah (minimal periode renstra) untuk semua indikator kinerja.
  - 4) LKj belum menyajikan informasi analisis keberhasilan/kegagalan kinerja yang dicapai.
  - 5) LKj belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara memadai (pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan pada aspek SOM/orang, anggaran, mekanisme/SOP, waktu dan lain-lain) penyajian efisiensi penggunaan sumber daya baru sebatas anggaran dan realisasi.
  - 6) Analisa LKj belum menyajikan analisis data pembanding dengan kinerja nasional/regional/atau daerah lain dengan indikator yang sama Uika ada).
3. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

**D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 21,88:**

1. Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja dan Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
2. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dan telah terlaksananya capaian kinerja internal sesuai dengan SOP.
3. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja namun belum seluruh

rekomendasi hasil evaluasi AKIP PD ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja (LKjIP) yang dilakukan terhadap Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, Tim evaluasi merekomendasikan kepada Camat Pancung Soal beserta seluruh jajarannya agar dapat dilakukan perbaikan untuk dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi, sebagai berikut :

### **1. Perencanaan Kinerja**

1. Melakukan monitoring kinerja atas Rencana Aksi setiap bulan, triwulan, dan semester dengan membuat laporan monitoring dengan kriteria:
  - Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (bulanan, triwulan, semester) dipantau kemajuannya;
  - Setiap ada deviasi atas aksi yang dilaksanakan segera dilakukan analisis dan dicarikan alternative solusinya;
  - Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kerja yang terbaru.
2. Selaraskan target kinerja yang ditetapkan dalam PK dengan target yang ditetapkan pada Renstra untuk sasaran kinerja "meningkatnya keterbukaan informasi publik".

### **2. Pengukuran Kinerja**

Melakukan revisi terhadap SOP pengumpulan data kinerja dengan memuat mekanisme yang jelas untuk kondisi jika terjadi kesalahan data agar data yang disajikan dapat diandalkan.

### **3. Pelaporan Kinerja**

- a) Sajikan pada LKj data dukung (sumber data) terkait kinerja yang dicapai sesuai dengan formulasi yang ditetapkan.
- b) Melengkapi perhitungan dan formula pencapaian kinerja pada IKU dan LKj.
- c) Sajikan pada LKj analisis dan evaluasi perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan jangka menengah (minimal periode renstra) untuk semua indikator kinerja.
- d) Menampilkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan untuk seluruh

indikator kinerja yang dijanjikan dalam PK OPD dan upaya perbaikan kedepan.

- e) Sajikan pada LKj analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja secara memadai (pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilakukan pada aspek SOM/orang, anggaran, mekanisme/SOP, waktu dan lain-lain).
- f) Sajikan pada LKj data pembandingan target, realisasi dan capaian kinerja dengan tingkat nasional/regional jika tidak ada indikator yang selaras dengan nasional/regional dijelaskan dalam LKj bahwa indikator yang digunakan berbeda dengan nasional/regional atau penjelasan lainnya.

#### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menjadikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PD sebagai perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja sehingga memberikan dampak efektifitas dan efisiensi Kinerja dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

#### 6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 3.3.7**  
**Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Nilai AKIP**

| Indikator Kinerja                 | Satuan | Indikator Kinerja |           |         | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisien Sumber Daya |
|-----------------------------------|--------|-------------------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|-----------------------------|
|                                   |        | Target            | Realisasi | Capaian | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |                             |
| Nilai AKIP Kecamatan Pancung Soal | Skala  | BB                | BB        | 98,18   | 1.854.723.879 | 1.810.018.664 | 97,59   | 2,5%                        |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

## **Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik.**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indeks Kepuasan Masyarakat telah dilakukan survey di kantor Camat Pancung Soal pada periode Januari-Juni tahun 2025.

### **1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.**

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.3.8**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025**

| No | Sasaran                                | Indikator                       | Satuan | 2025   |           |             |
|----|----------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
|    |                                        |                                 |        | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1  | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Indek kepuasan masyarakat (IKM) | %      | 86     | 91.40     | 106.28      |

*Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025*

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 91.40 dari target sebesar 86 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106.28 % atau melebihi target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \left\{ \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right\} \times 100\%$$

Target

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat capaian sebesar 106.28 %.

### **2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.**

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarkan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke empat pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

**Tabel 3.3.9**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan**  
**Masyarakat Tahun 2025 Dengan Tahun Sebelumnya**

| No | Indikator Kinerja               | Satuan | 2023   |           |             | 2024   |           |             | 2025   |           |             |
|----|---------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
|    |                                 |        | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1  | Indek kepuasan masyarakat (IKM) | %      | 85     | 85,20     | 100,23      | 85     | 85,37     | 100,43      | 86     | 91.40     | 106.28      |

*Sumber : Perencanaan dan Laporan tahun 2025*

Dari tabel 3.3.9 di atas dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 sebesar 106,28 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 Capaian Indikator kinerja sebesar 100,43% dan tahun 2023 Capaian Indikator Kinerja sebesar 100,23%. Pencapaian sasaran strategis tahun 2025 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Memuaskan**

### **3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.10 dibawah ini :

**Tabel 3.3.10**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan**  
**Masyarakat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis**  
**Kecamatan tahun 2021-2026**

| No | Indikator Kinerja               | Satuan | Target PK | Realisasi PK | Capaian PK | Target Restra | Realisasi restru | Capaian Restra |
|----|---------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|---------------|------------------|----------------|
|    |                                 |        | 2025      | 2025         | 2025       | 2025          | 2025             | 2025           |
| 1  | Indek kepuasan masyarakat (IKM) | %      | 86        | 91.40        | 106.28     | 86            | 91.02            | 104,6%         |

*Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025*

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa Target pada Perjanjian Kinerja lebih rendah dibandingkan dengan target Jangka menengah sesuai Renstra. Walaupun terjadi perubahan target capaian namun dapat dicapai dengan maksimal dan berjalan dengan lancar. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 dilakukan survey oleh kecamatan Pancung Soal .

#### **4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan Standar Nasional dapat dilihat pada Tabel 3.3.10 dibawah ini :

**Tabel 3.3.11**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan**  
**Masyarakat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya**

| Indikator Kinerja               | Satuan | Target PK | Realisasi PK | Capaian PK | Target/ Standar Nasional | Realisasi/ Standar Nasional | Capaian/ Standar Nasional |
|---------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                 |        | 2025      | 2025         | 2025       | 2025                     | 2025                        | 2025                      |
| Indek kepuasan masyarakat (IKM) | %      | 86        | 91.40        | 106.28     | -                        | -                           | -                         |

*Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025*

#### **5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

##### **1. Pelayanan yang Tepat Waktu**

- a. Pelayanan yang tepat waktu akan berdampak pada keefektifan dan keefisienan kerja, sehingga tidak menimbulkan kebosanan Masyarakat ketika mengurus suatu surat perizinan. Bila pelayanan dapat

berlangsung dengan tepat waktu maka kinerja Staf dapat dinilai baik oleh Camat maupun Masyarakat. Karena Staf telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

- b. Melaksanakan Pelayanan yang Tepat Waktu dapat dicontohkan seperti Masyarakat ingin Mengurus Surat Keterangan Miskin. Didalam pengurusan Surat Keterangan Miskin, Kecamatan telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dimana Nomor SOP tersebut, Nomor: 000.8.3.3/1598/CPS/2023 yang dibuat pada tanggal 29 Desember 2023.
- c. Didalam SOP tersebut berbunyi, Masyarakat yang mengurus Surat keterangan Miskin hanya memerlukan waktu selama 25 menit.
- d. Program pendukung yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu adalah Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik, karena minimnya anggaran, maka kegiatan tersebut dilaksana dengan kegiatan rutin kantor.

## 6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 3.3.12**  
**Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat**

| Indikator Kinerja               | Satuan | Indikator Kinerja |           |         | Anggaran  |           |         | Tingkat Efisiensi Sumber Daya |
|---------------------------------|--------|-------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-------------------------------|
|                                 |        | Target            | Realisasi | Capaian | Anggaran  | Realisasi | Capaian |                               |
| Indek kepuasan masyarakat (IKM) | %      | 86                | 91.40     | 106.28  | 2.434.000 | 2.434.000 | 100     | 0                             |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :  
Tingkat Efisiensi =  $1 - \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}}$  x 100%

Jumlah Anggaran

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,00%.

**7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :**

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan terdiri dari :**

**1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat**

Daerah Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

**3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**5. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak

- Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 adalah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal sebesar Rp. 2.434.000, 100% dari total anggaran sebesar Rp. . 2.434.000, sehingga tidak ada efisiensi anggaran.

### Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas inovasi Daerah

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri dalam Negeri nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang penguatan system Inovasi daerah, dimana daerah dalam rangka peningkatan pemerintah daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan Ekonomi Indonesia diperlukan penguatan system inovasi daerah secara terarah dan berkesinambungan.

#### 1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator

Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.3.13**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator**  
**Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025**

| No | Sasaran                              | Indikator                          | Satuan | 2024   |           |             |
|----|--------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
|    |                                      |                                    |        | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1  | Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah | Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | %      | 75     | 30,00     | 40          |

*Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025*

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Pancung Soal hanya mencapai 30 dari target 75 atau tingkat capaiannya mencapai 40 %. Inovasi yang divalidasi dan disetujui (approve) serta dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Capaian kinerja nyata Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan terhadap pelayanan kecamatan sebesar 40 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 40 % atau jauh dari target yang harus dicapai.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\{\text{Realisasi}\}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat capaian sebesar 40 %.

## **2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.**

Realisasi Capaian dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan atau peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah di anggarkan di awal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran.

Analisis Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan juga memuat keterkaitan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, perbandingan ini untuk mengevaluasi tingkat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun. Tahun 2025 merupakan tahun ke lima pada perencanaan renstra 2021-2026. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun lalu dengan tahun ini terlihat dalam table berikut :

**Tabel 3.3.14**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator**  
**Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025 dengan Tahun**  
**Sebelumnya**

| No | Indikator Kinerja                  | Satuan | 2023   |           |             | 2024   |           |             | 2025   |           |             |
|----|------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|
|    |                                    |        | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1  | Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | %      | 1      | 1         | 100         | 75     | 70        | 93,33       | 75     | 30,00     | 40          |

*Sumber : Perencanaan dan Laporan Tahun 2025*

Dari tabel 3.3.14 di atas dapat dilihat pada capaian indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2025 sebesar 30 % terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2024 Capaian Indikator kinerja sebesar 93,33% dan tahun 2023 Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis tahun 2025 termasuk kategori keberhasilan ***kurang***.

### 3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.15 dibawah ini :

**Tabel 3.3.15**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kematangan Inovasi**  
**Kecamatan Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis**  
**Kecamatan tahun 2021-2026**

| No | Indikator Kinerja                  | Satuan | Target PK | Realisasi PK | Capaian PK | Target Restra | Realisasi restr | Capaian Restra |
|----|------------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
|    |                                    |        | 2025      | 2025         | 2025       | 2025          | 2025            | 2025           |
| 1  | Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | %      | 75        | 30,00        | 40%        | 75            | 75              | 100%           |

*Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025*

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 30% dengan capaian Kurang .

#### **4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran ini adalah :

- Adanya Sinergitas OPD dalam Lingkup Pemerintah Kecamatan Pancung Soal sehingga dapat merumuskan inovasi terbaru di Kecamatan
- Adanya forum-forum yang telah terbentuk sehingga memudahkan perumusan inovasi-inovasi kecamatan
- Adanya dukungan dari Stekholder Kecamatan dan juga Pimpinan Daerah (Bupati) untuk terus berinovasi di Kecamatan Pancung Soal

Potensi Hambatan :

- Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mampu mendukung dalam penerapan Inovasi yang telah dibuat.
- Belum adanya buku inovasi yang merupakan sumber informasi inovasi yang ada di Kecamatan Pancung Soal

Sasaran Pemecahan :

- Melakukan Pelatihan dan Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat guna peningkatan sumber daya yang ada.
- Perlunya Penyusunan data dan informasi terkait Inovasi sebagai sumber informasi inovasi yang ada di Kecamatan Pancung Soal.

## 5. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 3.3.16**  
**Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator**  
**Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025**

| Indikator Kinerja                  | Satuan | Indikator Kinerja |           |         | Anggaran    |            |         | Tingkat Efisien Sumber Daya |
|------------------------------------|--------|-------------------|-----------|---------|-------------|------------|---------|-----------------------------|
|                                    |        | Target            | Realisasi | Capaian | Anggaran    | Realisasi  | Capaian |                             |
| Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan | %      | 75                | 30,00     | 40%     | 23.121.500, | 23.017.487 | 99.55   |                             |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :  
Tingkat Efisiensi =  $1 - \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}}$  x 100%.

Jumlah Anggaran

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,45%

## 6. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan terdiri dari :

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan

Desa Sub Kegiatan :

- PeningkatanPartisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 23.017.487,00 atau 99.55% dari total anggaran sebesar Rp 23.121.500,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 0,45 %.

#### **Sasaran 4 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari**

##### **A. Persentase Pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan Kinerja baik**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik.

Penghitungan Realisasi Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Nagari yang Administrasi baik}}{\text{Jumlah Nagari}} \times 100$$

Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik terdapat 10 Nagari dari 10 Nagari, sehingga persentase realisasi kinerja sebesar 100%.

##### **1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan**

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.3.17**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Persentase**  
**Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik**  
**Tahun 2025**

| No | Sasaran                                                                | Indikator                                  | Satuan | 2025   |           |             |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
|    |                                                                        |                                            |        | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari | Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki | %      | 82%    | 80        | 97,56       |

|  |  |                   |  |  |  |  |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|
|  |  | Administrasi baik |  |  |  |  |
|--|--|-------------------|--|--|--|--|

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Pancung Soal mencapai 80 dari target 82 atau tingkat capaiannya mencapai 97,56%

Capaian kinerja nyata Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik terhadap pelayanan kecamatan sebesar 82 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,56 % atau mencapai target.

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\{\text{Realisasi}\}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat realisasi sebesar 97,56 %

## 2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian kinerja nyata Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik terhadap pelayanan kecamatan pada tahun sebelumnya belum memiliki target kinerja.

## 3. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian kinerja nyata Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik terhadap pelayanan kecamatan pada tahun sebelumnya belum memiliki target kinerja.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.18 dibawah ini :

**Tabel 3.3.18**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator**  
**Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan**  
**kinerja baik Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana**  
**Strategis Kecamatan tahun 2021-2026**

| No | Indikator Kinerja                                            | Satuan | Target PK | Realisasi PK | Capaian PK | Target Restra | Realisasi Restra | Capaian Restra |
|----|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|---------------|------------------|----------------|
|    |                                                              |        | 2025      | 2025         | 2025       | 2025          | 2025             | 2025           |
| 1  | Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi baik | %      | 82        | 80           | 97,56      | <b>82</b>     | <b>100</b>       | <b>100</b>     |

*Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025*

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra memiliki target Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 97.56% dengan capaian masih harus ditingkatkan lagi .

#### **4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

#### **5. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional lainnya.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;

- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.

Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari.

Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah mengalokasikan Dana Nagari dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Nagari diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Suatu Nagari bisa dikatakan pengelola keuangannya baik, apabila telah merealisasikan anggaran mencapai diatas 90% lebih. Hal tersebut dapat diketahui pada realisasi anggaran per Nagari yang dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ada di nagari

## 6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 3.3.19**  
**Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator**  
**Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan**  
**kinerja baik Pada Tahun 2025**

| Indikator Kinerja | Satuan | Indikator Kinerja |           |         | Anggaran |           |         | Tingkat Efisien Sumber Daya |
|-------------------|--------|-------------------|-----------|---------|----------|-----------|---------|-----------------------------|
|                   |        | Target            | Realisasi | Capaian | Anggaran | Realisasi | Capaian |                             |
|                   |        |                   |           |         |          |           |         |                             |

|                                                              |   |    |    |       |               |               |       |      |
|--------------------------------------------------------------|---|----|----|-------|---------------|---------------|-------|------|
| Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi baik | % | 82 | 80 | 97,56 | 19.002.850,00 | 17.515.499,00 | 92.17 | 7,89 |
|--------------------------------------------------------------|---|----|----|-------|---------------|---------------|-------|------|

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :  

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\{\text{Jumlah Realisasi}\}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 7,89%.

## 2. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

### I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan

Kegiatan terdiri dari :

#### 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa.
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Pemerintah Nagari yang memiliki Administrasi dan kinerja baik Kecamatan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **17.515.499,00** atau **92.17 %** dari total anggaran sebesar Rp **19.002.850,00**, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar **7,89%**

## B. Angka Kemiskinan Ekstrim

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Angka Kemiskinan Ekstrim.

### 1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.3.20**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Angka**  
**Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025**

| No | Sasaran                                                                | Indikator                | Satuan | 2025   |           |             |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
|    |                                                                        |                          |        | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari | Angka Kemiskinan Ekstrem | %      | 0      | 0         | 100         |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Angka Kemiskinan Ekstrem Kecamatan Pancung Soal mencapai 0 dari target 0 atau tingkat capaiannya mencapai 100,00%.

## 2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian kinerja nyata Angka Kemiskinan Ekstrem terhadap pelayanan kecamatan pada tahun sebelumnya belum memiliki target kinerja.

## 3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrem Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.21 dibawah ini :

**Tabel 3.3.21**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Indikator Angka**  
**Kemiskinan Ekstrem Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026**

| No | Indikator Kinerja        | Satuan | Target PK | Realisasi PK | Capaian PK | Target Restra | Realisasi Restra | Capaian Restra |
|----|--------------------------|--------|-----------|--------------|------------|---------------|------------------|----------------|
|    |                          |        | 2025      | 2025         | 2025       | 2025          | 2025             | 2025           |
| 1  | Angka Kemiskinan Ekstrem | %      | 0         | 0            | 100        |               |                  |                |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target

Angka Kemiskinan Ekstrim sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 100% dengan capaian Sangat Tinggi .

#### **4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

#### **5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.**

Adanya kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Pancung Soal dalam rangka menanggulangi kemiskinan yang terkait dengan dimensi :

a. Dimensi ekonomi

Telah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah sosial, meningkatkan pelayanan sosial dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

b. Dimensi pendidikan

Kebijakan yang telah dilakukan adalah memfasilitasi PKBM, meningkatkan ketersediaan prasarana dan sara pendidikan dan memberdayakan masyarakat dan kelembagaan kampung.

c. Dimensi kesehatan

Kebijakan yang telah dilaksanakannya itu meningkatkan upaya kesehatan masyarakat, memperbaiki gizi masyarakat dan meningkatkan upaya kesehatan lingkungan ang berkja sama dengan Puskesmas yang ada di Kecamatan Pancung Soal .

d. Dimensi prasarana dasar

Kebijakan yang telah dilakukan dan bekerja sama dengan nagari serta stekholder terkait adalah meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan akses pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan perumahan masyarakat

berpenghasilan rendah, pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, serta penyediaan air baku dan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

e. Dimensi ketahanan pangan

Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah kecamatan Pancung Soal yang bekerja sama dengan nagari serta stekholder terkait adalah meningkatkan jalan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, meningkatkan teknologi, sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, peternakan serta perikanan, meningkatkan optimalisasi dan reklamasi lahan, meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka penanganan raanpangan, meningkatkan prasarana dan prasarana lumbung pangan, menyusun regulasi di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

## 6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 3.3.22**  
**Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator**  
**Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025**

| Indikator Kinerja        | Satuan | Indikator Kinerja |           |         | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisien Sumber Daya |
|--------------------------|--------|-------------------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|-----------------------------|
|                          |        | Target            | Realisasi | Capaian | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |                             |
| Angka Kemiskinan Ekstrim | %      | 0                 | 0         | 100     | 19.002.850,00 | 17.515.499,00 | 92.17   | 7,89                        |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :  

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar **7,89%**.

**7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :**

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

**I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan**  
Kegiatan terdiri dari :

**1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**  
Sub Kegiatan :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **17.515.499,00** atau 92,17 % dari total anggaran sebesar Rp 19.002.850,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 7,89%

**C. Prevalensi Stunting (EPPGM)**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik terdiri atas dari indikator kinerja yaitu Prevalensi Stunting (EPPGM).

**1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.**

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Prevalensi Stunting (EPPGM) Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.3.23**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025**

| No | Sasaran                                                                | Indikator                   | Satuan | 2025   |           |             |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
|    |                                                                        |                             |        | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1  | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan nagari | Prevalensi Stunting (EPPGM) | %      | 6,41%  | 2%        | >100        |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas diatas dapat dilihat realisasi capaian Prevalensi Stunting (EPPGM) Kecamatan Pancung Soal mencapai angka 2% dari target 6,41 atau tingkat capaiannya besar dari 100%.

Untuk Pencapaian Realisasi Prevalensi Stunting (EPPGM) dengan memakai Rumus :

$$\text{Jumlah Realisasi} = 6,41\% \times \frac{\text{Jumlah Sisa Stunting}}{\text{Jumlah Stunting}}$$

## 2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.

Capaian kinerja nyata Prevalensi Stunting (EPPGM) terhadap pelayanan kecamatan pada tahun sebelumnya belum memiliki target kinerja.

## 3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

Perbandingan capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting (EPPGM) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.24 dibawah ini :

**Tabel 3.3.24**

Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.

| No | Indikator Kinerja           | Satuan | Target PK | Realisasi PK | Capaian PK | Target Restra | Realisasi restra | Capaian Restra |
|----|-----------------------------|--------|-----------|--------------|------------|---------------|------------------|----------------|
|    |                             |        | 2025      | 2025         | 2025       | 2025          | 2025             | 2025           |
| 1  | Prevalensi Stunting (EPPGM) | %      | 6,41      | 2            | >100       |               |                  |                |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target Prevalensi Stunting (EPPGM) sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian melebihi 100% dengan capaian Sangat Tinggi .

#### 4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Prevalensi Stunting (EPPGM) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 dengan provinsi dan nasional, tidak terdapat dibandingkan karena merupakan target spesifik pada Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025.

#### 5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Permasalahan dan Solusi Prevalensi Stunting Anak Balita yang Berkalaborasi dengan Puskesmas :

- a) Perlu melakukan skrining anemia remaja putri dan pelaksanaan pemeriksaan HB yang dilengkapi dengan pemehunan BMHP bagi pemeriksaan HB di Puskesmas.
- b) Belum optimalnya konsumsi TTD Rematri.
- c) Masih kurangnya SDM untuk mendukung penanganan stunting dipuskesmas, terutama tenaga dokter, sanitarian, apoteker dan tenaga laboratorium.

#### 6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 3.3.25**  
**Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran Indikator Prevalensi Stunting (EPPGM)**

| Indikator Kinerja           | Satuan | Indikator Kinerja |           |         | Anggaran      |               |         | Tingkat Efisien Sumber Daya |
|-----------------------------|--------|-------------------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|-----------------------------|
|                             |        | Target            | Realisasi | Capaian | Anggaran      | Realisasi     | Capaian |                             |
| Prevalensi Stunting (EPPGM) | %      | 6,41              | 2         | >100    | 19.002.850,00 | 17.515.499,00 | 92.17   | 7,89                        |

*Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025*

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :  
$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar **7,89%**.

#### **7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :**

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

##### **I. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan**

Kegiatan terdiri dari :

##### **2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan :**

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Angka Kemiskinan Ekstrim Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **17.515.499,00** atau 92,17 % dari total anggaran sebesar Rp **19.002.850,00**, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 7,89%.

#### **Sasaran 5 : Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan**

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan Dinamis terdiri atas dari 1 indikator kinerja yaitu Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Pancung Soal

##### **1. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan.**

Perbandingan antara Target, realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Berjalan dengan Indikator Persentase Konflik yang diselesaikan Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.3.26**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Tahun 2025**

| No | Sasaran                                                                       | Indikator                            | Satuan | 2025   |           |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
|    |                                                                               |                                      |        | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1  | Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan Dinamis | Persentase Konflik yang diselesaikan | %      | 80%    | 80%       | 100%        |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel 3.3.26 di atas dapat dilihat Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Pancung Soal Tahun 2025 mencapai target dengan capaian 100%.

## **2. Analisis Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya.**

Capaian kinerja nyata Persentase Konflik yang diselesaikan terhadap pelayanan kecamatan pada tahun sebelumnya belum memiliki target kinerja .

## **3. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026.**

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.3.25 dibawah ini :

**Tabel 3.3.27**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis Kecamatan tahun 2021-2026**

| No | Indikator Kinerja                    | Satuan | Target PK | Realisasi PK | Capaian PK | Target Restra | Realisasi restr | Capaian Restra |
|----|--------------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
|    |                                      |        | 2025      | 2025         | 2025       | 2025          | 2025            | 2025           |
| 1  | Persentase Konflik yang diselesaikan | %      | 80        | 80           | 100%       |               |                 |                |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Realisasi Tahun 2025 dibandingkan Target capaian Tahun 2025 Dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa target Jangka menengah sesuai Renstra tidak memiliki target

Persentase Konflik yang diselesaikan sedangkan pada Perjanjian Kinerja target capaian sebesar 100% dengan capaian Sangat Tinggi.

#### 4. Analisa Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya.

Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang diselesaikan Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.3.28**  
**Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional lainnya**

| Indikator Kinerja                    | Satuan | Target PK | Realisasi PK | Capaian PK | Target/ Standar Nasional | Realisasi/ Standar Nasional | Capaian/ Standar Nasional |
|--------------------------------------|--------|-----------|--------------|------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|                                      |        | 2025      | 2025         | 2025       | 2025                     | 2025                        | 2025                      |
| Persentase Konflik yang diselesaikan | %      | 80%       | 80%          | 100%       | -                        | -                           | -                         |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

#### 5. Analisa Penyebab Kegagalan atau Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Ada beberapa faktor yang mendukung tercapainya Indikator Sasaran ini diantaranya :

- a. Dukungan dana dari Stekholder untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pancung Soal;
- b. Sinergisitas antar lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik yang terjadi di KEcamatan Pancung Soal;
- c. Dukungan warga tarusan secara keseluruhan dalam menjaga kondusifitas Kecamatan Pancung Soal .

Beberapa permasalahan atau Tantangan yang dihadapi KEcamatan Pancung Soal dalampencapaian sasaran perangkat daerah diantaranya yaitu:

- a. Heterogennya masyarakat KEcamatan Pancung Soal , sehingga rawan terjadi gesekan sosial di masyarakat, baik yang disebabkan SARA maupun persoalan sosial lainnya;
- b. Permasalahan masih adanya peredaran gelap Narkoba di Kecamatan

Pancung Soal yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan cegah dini;

- c. Mempertahankan KEcamatan Pancung Soal sebagai Kota dengan predikat baik dalam kerukunan dan toleransi masyarakat (The City Of Tolerance).

## 6. Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis optimalisasi pemanfaatan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 3.3.29**  
**Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran**

| Indikator Kinerja                    | Satuan | Indikator Kinerja |           |         | Anggaran     |              |         | Tingkat Efisien Sumber Daya |
|--------------------------------------|--------|-------------------|-----------|---------|--------------|--------------|---------|-----------------------------|
|                                      |        | Target            | Realisasi | Capaian | Anggaran     | Realisasi    | Capaian |                             |
| Persentase Konflik yang diselesaikan | %      | 80%               | 80%       | 100%    | 2.148.740,00 | 2.148.740,00 | 100     | 0,00                        |

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :  

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Anggaran}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,00%.

## 7. Analisis Program kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja, adalah sebagai berikut :

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

I. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan terdiri dari :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Persentase Konflik yang diselesaikan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.148.740,00 atau 100% dari total anggaran sebesar Rp. 2.148.740,00, sehingga tidak ada efisiensi anggaran 0,00%.

### 3.4 Realisasi Anggaran

**Tabel 3.4.1**  
**Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**  
**Kantor Camat Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025**

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan         | Uraian Program/Kegiatan | Indikator Kinerja                                  | Satuan                                                                        | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan     | Solusi | Tindakan<br>Rekomendasi<br>DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|--------|---------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                          | 4                 | 5                       | 6                                                  | 7                                                                             | 8              | 9                 | 10                    | 11                      | 12               | 13     | 14                              |
| 1  |                     | Kewilayahan                | Kec. Pancung Soal |                         | Program/Keg Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan Nilai Lakip Kecamatan Pancung Soal | Bulan          | 12                |                       | 1.802.776.789           | 1.759.674.848    |        |                                 |
|    | 1.1                 |                            |                   |                         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                  | Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya     | Bulan          | 12                |                       | 1.492.592.129           | 1.458.977.434    |        |                                 |
|    | 1.2                 |                            |                   |                         | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN      | Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan                             | Bulan          | 12                | 100                   | 52.770.000              | 52.770.000       | -      |                                 |
| 2  |                     |                            |                   |                         | Program/Keg Administrasi                           | Meningkatkan kualitas                                                         | Bulan          | 12                | 96.52                 | Rp143.024.430,00        | Rp142.906.586,00 |        |                                 |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan                                          | Indikator Kinerja                                                           | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindakan Rekomendasi DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------------------|
| 1  | 2                   | 3                          | 4         | 5                                                                | 6                                                                           | 7      | 8              | 9                 | 10                    | 11                      | 12           | 13     | 14                        |
|    |                     |                            |           | Umum Perangkat Daerah                                            | pelayanan publik dan Nilai Lakip Kecamatan Pancung Soal                     |        |                |                   |                       |                         |              |        |                           |
|    | 2.1                 |                            |           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Ketersediaannya bahan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Bulan  | 12             | 100               | 2.098.297             | 2.098.297               |              |        |                           |
|    | 2.2                 |                            |           | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Ketersediaan bahan dan peralatan kebersihan gedung kantor                   | Bulan  | 12             | 100               | 2.275.750             | 2.275.750               |              |        |                           |
|    | 2.3                 |                            |           | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Ketersediaan alat tulis kantor                                              | Bulan  | 12             | 100               | 19.154.160            | 19.154.160              |              |        |                           |
|    | 2.4                 |                            |           | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | ketersediaan barang cetak dan penggandaan                                   | Bulan  | 12             | 100               | 5.272.000             | 5.272.000               |              |        |                           |
|    | 2.5                 |                            |           | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         | ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                  | Bulan  | 12             | 0                 | 0                     | 0                       |              |        |                           |

| No | Ururan<br>Pemerintah<br>an | Perangkat<br>Daerah<br>Pelaksana | Kebijaka<br>n           | Uraian<br>Program/Kegiatan | Indikator Kinerja                                                                                | Satua<br>n                                                                                                 | Target<br>Kinerja | Realisa<br>si<br>Kinerja | Alokasi<br>Anggaran<br>(Rp) | Realisasi<br>Anggaran (Rp) | Perm<br>asala<br>han | Solusi | Tindakan<br>jut<br>Rekomen<br>dasi<br>DPRD |
|----|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                          | 3                                | 4                       | 5                          | 6                                                                                                | 7                                                                                                          | 8                 | 9                        | 10                          | 11                         | 12                   | 13     | 14                                         |
|    | 2.6                        |                                  |                         |                            | Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu                                                                     | Ketersediaan<br>makan minum<br>tamu                                                                        | Bulan             | 12                       | 99,82                       | 9.900.000                  | 9.882.799            |        |                                            |
|    | 2.7                        |                                  |                         |                            | Penyelenggaraan<br>Rapat Koordinasi<br>dan Konsultasi<br>SKPD                                    | Ketersediaan<br>makan minum<br>rapat dan<br>perjalanan dinas<br>untuk koordinasi<br>dan konsultasi<br>SKPD | Bulan             | 12                       | 96,83                       | 61.365.500                 | 59.423.184           |        |                                            |
|    |                            |                                  |                         |                            | Program/Keg<br>Pengadaan<br>Barang milik<br>daerah penunjang<br>urusan<br>pemerintahan<br>daerah | Ketersediaannya<br>peralatan alat<br>dan mesin untuk<br>sarana dan<br>prasarana<br>penunjang<br>kinerja    | Unit              | 1                        | 88,75                       | 14.087.500                 | 12.500.000           |        |                                            |
|    |                            |                                  |                         |                            | Pengadaan<br>peralatan dan<br>mesin lainnya                                                      | Tersedianya<br>peralatan dan<br>mesin lainnya                                                              | Unit              | 1                        | 88,75                       | 0                          | 0                    |        |                                            |
| 3  |                            | Kewilayahan                      | Kec.<br>Pancung<br>Soal |                            | Program/Keg<br>Penyediaan Jasa<br>Penunjang Urusan<br>Pemerintahan<br>Daerah                     | Tersedianya jasa<br>untuk penunjang<br>pelayanan<br>urusan<br>administrasi<br>kantor                       | Bulan             | 12                       | 95,46                       | 79.019,004                 | 75.434.892           |        |                                            |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan         | Uraian Program/Kegiatan                                                                                          | Indikator Kinerja                                                                                  | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindakan<br>Rekomendasi<br>DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                          | 4                 | 5                                                                                                                | 6                                                                                                  | 7      | 8              | 9                 | 10                    | 11                      | 12           | 13     | 14                              |
|    | 3.1                 |                            |                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Belanja tagihan listrik dan air                                                                    | Bulan  | 12             | 70,13             | 12.000.000            | 8.415.888               |              |        |                                 |
|    | 3.2                 |                            |                   | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                            | Belanja jasa pelayanan umum                                                                        | Bulan  | 12             | 100               | 66.719.004            | 66.719.004              |              |        |                                 |
| 4  |                     | Kewilayahan                | Kec. Pancung Soal | Program/Keg Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan dan kelengkapan gedung kantor                        | Bulan  | 12             | 99,73             | 47.569.269            | 47.444.752              |              |        |                                 |
|    | 4.1                 |                            |                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya jasa dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional untuk menunjang kinerja dilapangan | Bulan  | 12             | 99,67             | 36.799.269            | 36.680.518              |              |        |                                 |
|    | 4.2                 |                            |                   | Pemeliharaan Peralatan dan                                                                                       | Terpeliharanya Peralatan gedung                                                                    | Bulan  | 12             | 99,87             | 35.600.000            | 35.554.437              |              |        |                                 |

| No  | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan | Uraian Program/Kegiatan                                                                   | Indikator Kinerja                                                              | Satuan | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindakan<br>Rekomendasi<br>DPRD |
|-----|---------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------------------------|
| 1   | 2                   | 3                          | 4         | 5                                                                                         | 6                                                                              | 7      | 8              | 9                 | 10                    | 11                      | 12           | 13     | 14                              |
|     |                     |                            |           | Mesin Lainnya                                                                             | kantor                                                                         |        |                |                   |                       |                         |              |        |                                 |
| 4.3 |                     |                            |           | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                              | Terpeliharanya sarana dan prasarana peralatan dan kelengkapan gedung kantor    | Bulan  | 12             | 99,91             | 6.720.000             | 6.714.234               |              |        |                                 |
| 5   | Perencanaan         | Kec. Pancung Soal          |           | Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                             | Mewujudkan pembinaan masyarakat nagari                                         | Nagari | 10             | 100               | 19.002.850            | 17.515.499              |              |        |                                 |
| 5.1 |                     |                            |           | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Mewujudkan pembangunan yang berkesenambungan                                   | Usulan | 21             | 100               | 999.850               | 999.850                 |              |        |                                 |
| 5.2 |                     |                            |           | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan             | Pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga dengan membangun | Nagari | 10             | 91,7              | 18.003.000            | 16.515.649              |              |        |                                 |

| No | Urusan Pemerintahan | Perangkat Daerah Pelaksana | Kebijakan         | Uraian Program/Kegiatan | Indikator Kinerja                                                               | Satuan                                                                    | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Alokasi Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Permasalahan | Solusi | Tindakan<br>Rekomendasi<br>DPRD |
|----|---------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|--------|---------------------------------|
| 1  | 2                   | 3                          | 4                 | 5                       | 6                                                                               | 7                                                                         | 8              | 9                 | 10                    | 11                      | 12           | 13     | 14                              |
|    |                     |                            |                   |                         | semangat olahraga                                                               |                                                                           |                |                   |                       |                         |              |        |                                 |
| 6  |                     | Kewilayahan                | Kec. Pancung Soal |                         | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase fasilitasi dan pembinaan kewilayahan                           | Perse n        | 100               | 99,55                 | 23.121.500              | 23.017.487   |        |                                 |
|    | 6.1                 |                            |                   |                         | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                         | Terlaksananya peringatan hari besar nasional                              | Nagari         | 10                | 100                   | 21.277.500              | 21.173.487   |        |                                 |
|    | 6.2                 |                            |                   |                         | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                        | Jumlah ormas dan kelompok masyarakat dilakukan pembinaan dan difasilitasi | Nagari         | 10                | 100                   | 1.844.000               | 1.844.000    |        |                                 |

**Keterangan:**

1. Kolom 1 : Penomoran sesuai dengan program dan kegiatan yang disusun secara sistematis sesuai kode rekening. Terdiri dari 2 Subkolom, Subkolom 1 untuk penomoran program dan Subkolom 2 untuk penomoran kegiatan;
2. Kolom 2: Diisi dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah;

3. Kolom 3: Diisi dengan nama Perangkat Daerah/Badan;
4. Kolom 4: Diisi dengan Peraturan yang melandasi penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut;
5. Kolom 5: Diisi dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025. Diisi secara sistematis dimulai dengan nomenklatur program dilanjutkan dengan nomenklatur setiap kegiatan yang termasuk dalam program tersebut dan seterusnya;
6. Kolom 6: Indikator kinerja diisi dengan Indikator Kinerja Program/*Outcome* dan Indikator Kinerja Kegiatan/*Output* sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025;
7. Kolom 7: Diisi satuan indikator kinerja;
8. Kolom 8: Diisi dengan target kinerja sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2025;
9. Kolom 9: Diisi dengan capaian/realisasi indikator kinerja;
10. Kolom 10: Diisi dengan alokasi anggaran program dan kegiatan sesuai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
11. Kolom 11: Diisi dengan realisasi SPJ setiap program dan kegiatan;
12. Kolom 12: Diisi dengan permasalahan yang terjadi dari pelaksanaan program dan kegiatan. Agar menghindari penjelasan permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya alokasi anggaran;
13. Kolom 13: Diisi dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan;
14. Kolom 14: Diisi dengan penjelasan yang menunjukkan apabila program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan yang ditujukan untuk menjawab Rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2025; dan
15. Dalam hal isian Kolom 2 s.d Kolom 4 sama, maka pada baris selanjutnya tidak perlu diisi lagi.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.

Berdasarkan Realisasi Keuangan dan belanja pada Kecamatan Pancung Soal yang mana jumlah anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. 1.955.817.471,- (Satu miliar Sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Kemudian dianggarkan perubahan menjadi Rp. 1.854.723.879,- (Satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan anggaran perubahan tereliasasi di triwulan ke-4 (empat) sebesar Rp. 1.810.018.664,- (Satu miliar delapan ratus sepuluh juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dengan Realisasi 97.59%, sisa anggaran Rp. 44.705.215,- (2,50%), Dapat di evaluasi dan analisis untuk masing-masing Program dan Kegiatan sebagai berikut:

#### **3.4.1 Anggaran**

Pagu Anggaran yang tersedia pada belanja tidak langsung ini sebesar Rp. Rp. 1.505.817.471,- (Satu miliar lima ratus lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Selanjutnya efisiensi pengurangan anggaran ditriwulan pertama maka diperubahan Anggaran di triwulan ke-4 (empat) dimana anggaran Kecamatan Pancung Soal ada perubahan menjadi Rp. 1.492.592.129,- (Satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) yang mana realisasi belanja tahun ini sampai 31 Desember 2025 mencapai Rp. 1.456.977.434,- (97,61%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 43.117.715,- (2,39%), (SPj Fungsional per 31 Desember 2025 terlampir).

#### **3.4.2 Realisasi**

Pagu awal tersedia pada Belanja sebesar Rp. Rp. 1.505.817.471,- (Satu miliar lima ratus lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Selanjutnya diperubahan Anggaran di triwulan ke-4 (empat) dimana anggaran Kecamatan

Pancung Soal ada perubahan menjadi Rp. 1.492.592.129,- (Satu miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri dari Belanja Pegawai ASN yang mencakup gaji dan beberapa tunjangan ASN dan ditambah dengan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan Anggaran sebesar Rp. 1.955.817.471,- (Satu miliar Sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Kemudian dianggarkan perubahan menjadi Rp. 1.854.723.879,- (Satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan anggaran perubahan tereliasasi di triwulan ke-4 (empat) sebesar Rp. 1.810.018.664,- (Satu miliar delapan ratus sepuluh juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dengan Realisasi 97,59%, sisa anggaran Rp. 44.705.215,- (2,50%), Dapat di evaluasi dan analisis untuk masing-masing Program dan Kegiatan sebagai berikut:

## **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Merupakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.802.776.789,- dengan realisasi belanja sebesar Rp.1.759.674.848,- (97,60%) dan sisa anggaran sebesar Rp.43.101.941,- (2,4%), dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

### **1.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Merupakan kegiatan menunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN untuk dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.549.845.929,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.514.210.434,- (97,70%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 35.635.495,- (2,30%).

#### **a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Merupakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.492.592.129,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.456.977.434,- (97,61%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 35.614.695,-

(2,39%), adapun anggaran yang tidak terealisasi disebabkan adanya purna tugas (Pensiun) atau mutasi jabatan berdasarkan pangkat dan golongan.

**b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Merupakan kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 52.770.000,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 52.770.000,- (100%) dan sisa anggaran sebesar Rp.0,- (0%)

**1.2. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Merupakan kegiatan menunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk dalam pelaksanaan pelayanan umum perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 100.066.707,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 98.057.990,- (97,99%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 2.008.717,- (2,01%) dengan kegiatan sebagai berikut :

**a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Merupakan kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.098.297,- dan realisasi belanja sebesar Rp. 2.098.297,- (100%) .

**b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, terdiri dari Belanja peralatan dan bahan kebersihan kantor, dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 2.275.750,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.275.750,- (100%)

**c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor dan benda-benda pos lainnya dengan pagu anggaran tersedia sebesar Rp. 19.154.164,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.154.164,- (100%) .

**d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi akan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.272.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.223.800,- (100%).

**e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan pada kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.0,- terdiri dari belanja surat kabar/majalah dengan realisasi keuangan sebesar Rp.0,- (0%).

**f. Fasilitas Kunjungan Tamu**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan tamu kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.900.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.882.799,- (99,82%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 17,201- (0,18%).

**g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah baik dalam propinsi maupun luar propinsi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 61.366.500 dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 59.432.184,- (96,84) dan sisa belanja Rp. 1.943.316,- (3,16%).

**1.3. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan**

Merupakan program untuk Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga dapat kinerja yang maksimal tercapai, dengan pagu anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar Rp. 0,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 0,- (0%), dan sisa anggaran Rp. 0,- (0%). dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

**a. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya**

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga dapat kinerja yang maksimal tercapai, dengan pagu anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar Rp. 0,- yang mana realisasi keuangan tercapai Rp. 0,- (0%), dan sisa anggaran Rp. 0,- (0%)

#### **1.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Merupakan kegiatan untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam memenuhi peralatan dan bahan penerangan gedung kantor, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 79.019.004,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 75.434.892,- (95,46%) dan sisa anggaran sebesar Rp 3.584.112,- (4,54%) dengan kegiatan sebagai berikut :

##### **a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Merupakan kegiatan menunjang penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam pelaksanaan pelayanan umum perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 12.000.000,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 8.415.888,- (70,13%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.584.112,- (29,9%).

##### **b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Merupakan kegiatan menunjang Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dalam pelaksanaan pelayanan umum perkantoran, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 66.719.004,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 66.719.004,- (100%) .

#### **1.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Merupakan program untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga dapat kinerja yang maksimal tercapai, dengan pagu anggaran keseluruhan yang tersedia sebesar Rp.

47.569.269,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 47.444.752,- (99.73%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 124.517,- (0,87%). dilaksanakan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

**a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Merupakan kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor, berupa belanja modal/pengadaan peralatan gedung kantor, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 38.901.811,- dengan realisasi keuangan Rp. 38.844.700,- (99.52%) dan realisasi belanja sebesar Rp. 57.111,- (0.48%).

**b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Merupakan kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya untuk memenuhi peralatan pelayanan administrasi kantor, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 6.250.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 6.250.000,- (100%) dan sisa belanja sebesar Rp.0,- (0%).

**c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Merupakan kegiatan untuk memelihara kebutuhan secara berkala pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya gedung kantor, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.772.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 10.772.000,- (100%) dan sisa belanja sebesar Rp. 0,- (0.0%).

**2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Merupakan program bertujuan untuk program koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan kegiatan memfasilitasi pembinaan kelembagaan sosial masyarakat, rincian belanja terdiri dari perjalanan dinas, pagu anggarannya sebesar Rp. 20.473.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 20.463.000,- (99.95%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 10.000,- (0.05%).

**a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**

Merupakan program bertujuan untuk kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan kegiatan memfasilitasi pembinaan kelembagaan sosial masyarakat, rincian belanja terdiri dari perjalanan dinas, pagu anggarannya sebesar Rp. 20.473.000,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 20.463.000,- (99.95%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 10.000,- (0.05%) sebagai berikut :

**1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**

Merupakan kegiatan untuk perencanaan dan meningkatkan pembangunan daerah diwilayah Kecamatan Pancung Soal merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD), dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.340.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.340.000,- (100%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 0,- (0%).

**2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

Merupakan kegiatan pembinaan kelembagaan sosial masyarakat salah satunya Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat, rincian belanja terdiri dari perjalanan dinas, pagu anggarannya sebesar Rp. 15.133.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.123.000,- (99.93%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 10.000,- (0.07%).

**3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Merupakan program untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan diwilayah Kecamatan Pancung Soal, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. . 22.717.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 22.392.000,- (98.57%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 325.000,- (1.43%), dengan kegiatan :

**a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.**

Merupakan program untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan diwilayah Kecamatan Pancung Soal, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. . 22.717.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 22.392.000,- (98.57%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 325.000,- (1.43%), dengan kegiatan :

#### **1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa**

Merupakan program yang bertujuan meningkatkan Kecintaan terhadap Tanah Air dengan rangkaian kegiatan berupa pelaksanaan Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun RI (HUT RI) ke-80 tahun 2025, dimana pagu anggarannya sebesar Rp. 19.717.500,- terealisasi keuangan sebesar Rp. 19.417.500,- (98.48%), dan sisa belanja sejumlah Rp. 300.000,- (1.42%).

#### **2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**

Merupakan program untuk melaksanakan koordinasi antar pimpinan instansi atau Muspika diwilayah Kecamatan untuk pembinaan kewilayahan untuk pembangunan, dengan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 3.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 2.975.000,- (99.17%), dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.350.000,- (0.83%).

Selanjutnya dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 ini dimana anggaran yang dialokasikan banyak tidak terlaksana mengingat waktu tidak mengizinkan sehingga Program dan Kegiatan tertunda atau ditiadakan, dan akan lebih terinci dan tertera di lampiran LKPj, seperti belanja tidak langsung dan belanja langsung terlihat dalam SPj Fungsional dan dalam Laporan APBD dan Fisik Tahun Anggaran 2025 dengan keadaan per 31 Desember 2025.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Camat Pancung Soal Akhir Tahun Anggaran 2025 (LKPj) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang kami laksanakan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan kegiatan berjalan cukup optimal meskipun masih terjadi beberapa permasalahan, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaan tugas kami di kecamatan. Di sisi lain masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator yang harus ditingkatkan adalah Kematangan Inovasi Daerah yang masih rendah, perlu kerjasama semua pihak yang terkait dengan inovasi sehingga dapat terlaksana dengan baik.
2. Capaian Indikator Kinerja  
Dari 7 (tujuh) indikator kinerja yang telah ditetapkan, Beberapa mencapai target dengan baik.
3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran  
Anggaran sebesar Rp. 1.955.817.471,- (Satu miliar Sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Kemudian dianggaran perubahan menjadi Rp. 1.854.723.879,- (Satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan anggaran perubahan tereliasasi di triwulan ke-4 (empat) sebesar Rp. 1.810.018.664,- (Satu miliar delapan ratus sepuluh juta

delapan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dengan Realisasi 97.59%, sisa anggaran Rp. 44.705.215,- (2,50%)

#### **4.2 SARAN**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Kecamatan Pancung Soal yang melibatkan seluruh Pejabat Struktural di Kecamatan Pancung Soal secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program. Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan tugas pada Tahun Anggaran 2025 patut disyukuri, keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen yang ada. Apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kecamatan Pancung Soal yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Camat Pancung Soal Akhir Tahun Anggaran 2025, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

## PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Kecamatan Pancung Soal dalam periode lima tahun (2021 sampai dengan 2025) mendapatkan Penghargaan dibeberapa kegiatan,antara lain sebagai berikut :

| No. | Penghargaan                                                                          |                                        |                           |                          |                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Nama                                                                                 | Pemberi                                | Pd/Badan Penerima         | Tempat dan Tanggal       | Dokumentasi                                                                           |
| 1   | 2                                                                                    | 3                                      | 4                         | 5                        | 6                                                                                     |
| 1.  | Terbaik IV Kategori Kecamatan Kualifikasi “Cukup Informatif “                        | Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat  | Kantor Camat Pancung Soal | Painan, Desember 2022    |    |
| 2.  | Terbaik IV Kategori Kecamatan Kualifikasi “Menuju Informatif “                       | Bupati Pesisir Selatan                 | Kantor Camat Pancung Soal | Painan, 22 Desember 2023 |   |
| 3.  | Terbaik II Lomba Bidang Pokja IV Jambore PKK Tk.Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 | Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan | Kantor Camat Pancung Soal | Painan, 8 Juni 2024      |  |
| 4.  | Terbaik II Lomba Bidang Pokja IV Jambore PKK Tk.Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 | Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan | Kantor Camat Pancung Soal | Painan, 8 Juni 2024      |  |

|    |                                                                    |                                                   |                           |                           |                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Kegiatan Khitanan Untuk Negeri 2024                                | Bakri Amanah" Lembaga Amil Zakat Nasional"        | Kantor Camat Pancung Soal | Jakarta, 20 Desember 2024 |    |
| 6. | Juara 3 Lomba Qasidah Rabana BKMT Festival Muharram 1447 H/ 2025 M | Kepala Kementrian Agama Kabupaten Pesisir Selatan | Kantor Camat Pancung Soal | Painan, 2025              |    |
| 7. | Harapan I Lomba Mars Dasawisma                                     | Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan            | Kantor Camat Pancung Soal | Painan, 7 Oktober 2025    |   |
| 8. | Terbaik II Lomba Storytelling/ Kader Bercerita                     | Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan            | Kantor Camat Pancung Soal | Painan, 7 Oktober 2025    |  |

